

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dominasi kekuasaan atas pemerintahan Duterte yang bersifat otoriter melalui kebijakan semena-mena *war on drugs* terbukti telah menimbulkan kemunduran demokrasi. Hal itu ditunjukkan dari menurunnya angka indeks demokrasi Filipina selama tahun 2016-2022 pada masa kepemimpinan Duterte berdasarkan data dari Freedom House dengan skor terendah sebesar 55.

Melemahnya ketajaman hukum dengan adanya praktik gelombang kekerasan pembunuhan di luar proses hukum terhadap ribuan tersangka pengguna narkoba, ketatnya pengawasan terhadap aspek kebebasan dalam kebebasan sipil dengan penindasan terhadap jurnalis dan masyarakat sipil, serta terjadinya penurunan pengawasan dan keseimbangan kelembagaan yang dimaksudkan untuk menjamin keadilan dan akuntabilitas dengan tindakan keras terhadap oposisi berlimpah di bawah kepemimpinan Duterte mengakibatkan meningkatnya kemunduran demokrasi di Filipina. Hanya lembaga eksekutif di bawah kekuasaan Duterte yang berhak mengontrol sistem dan pelaksanaan kebijakan *war on drugs*, dimana hal itu sejalan dengan teori *executive aggrandizement* yang mengungkapkan dominasi lembaga eksekutif dalam memutuskan kebijakan.

Duterte dalam kebijakan kontraversialnya yaitu *war on drugs* telah menjadi sosok yang sangat kuat di panggung politik Filipina. Keberhasilannya dalam

mempertahankan kekuasaannya dan menjalankan kebijakan *war on drugs* nya menunjukkan bahwa dia memiliki basis dukungan yang kokoh dan tidak tergoyahkan, yang membuatnya sulit dihentikan dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Meskipun kontroversialitas kebijakannya telah mengundang banyak debat dan kritik, Duterte terus berkuasa dan berperan penting dalam dinamika politik Filipina.

